

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL LLDA LAK DENCHASH AN DASAL 20

FORMU	ILIR	17	21	- V	1

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

	A I AU PAJAI	A I AU PAJAK PENGHASILAN PASAL 20				
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PA		00257	Masa Pajak	-Tahun Pajak : _	12 - 202	2024
A. IDENTITAS PENERIMA	N PENGHASILAN YANG	DIPOTONG				
1. NPWP : 94012	5206405000 / 3202296008	980011 2. NI	K/NO.PASPOR	: -		
3. NITKU : 32022	96008980011000000					
4. NAMA : AURA	ZAHRA AQILAH					
5. ALAMAT : PERU	MAHAN MANGKALAYA RE	ESIDENCE				
6. WAJIB PAJAK : LUAR NEGERI	′A	7. K	ODE NEGARA D	OOMISILI :		
B. PPh PASAL 21 DAN/A	TAU PASAL 26 YANG D	DIPOTONG				
KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTO	ONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
21-100-03	4.372.950	4.372.950		0		0
C. NOMOR DOKUMEN RI	EFERENSI FASILITAS A	ATAU SURAT KETERA	ANGAN DOMI	SILI :		
D. IDENTITAS PEMOTON	G					
1 NPWP . 76/1	8/07/0/1000 / 076/18/07	74041000 5 TAN	JGGAL & TANDA	Δ ΤΔΝGΔΝ		

764184974041000 / 0764184974041000 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE DIZEX6U8

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang 21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli 21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26